



RENCANA KERJA

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Awal Tahun 2024. Biro Pemerintahan merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan Pemerintahah, Otonomi Daerah, dan Kerjasama.

Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan lanjutan dari Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 – 2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun guna menjamin adanya konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dan akan menjadi pedoman umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Padang, Juli 2024
Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH



Ferdinal, S. STP
Pembina Tingkat I
NIP. 198002505 19981 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	32
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Penyusunan Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, mempedomani Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pencapaian sasaran Renja SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Penyusunan Renja OPD tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra K/L dan Renstra OPD serta RKPD Daerah.

Proses penyusunan Renja Tahun 2025 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana dalam peraturan tersebut dicantumkan beberapa aturan yang harus dipedomani dalam penyusunan Renja. Berdasarkan tata cara penyusunan Renja bahwa setiap OPD perangkat daerah harus membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah. Adapun Tim Penyusun Renja Tahun 2025 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DONI RAHMAT SAMULO,S.STP,M.SI	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pengarah
2	NUZURWAN ERIXON,S.IP,M.Si	Kabag Pemerintahan	Ketua
3	ARNEL EFITA,SE,M.SI	Kasubag Tata Usaha	Sekretaris
4	ZAKI FAHMINANDA,S.STP,MPA	Kabag Kerjasama	Anggota
5	DJAYA PUTRA GANI,S.IP	Pejabat Fungsional	Anggota
6	YUANDA OGI PRAMANA, SIP	Pejabat Fungsional	Anggota
7	AFNITA.R, S.Sos	Pejabat Fungsional	Anggota
8	AGUNG EKA MULYA DHARMA,SH	Pejabat Fungsional	Anggota
9	FEBRIANTO,S.Sos	Pejabat Fungsional	Anggota

10	SOLVI YANTI, S.Sos	Pejabat Fungsional	Anggota
12	QADRIANSYAH, S.STP	Pejabat Fungsional	Anggota
13	Staf Tata Usaha	Pejabat Fungsional	Sekretariat

1.2. LANDASAN HUKUM

Renja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat dan hasil Musrenbang RKPd untuk melaksanakan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat;
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat ;
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat serta indikator kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan dalam program satu tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD,

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD,

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,

3.3. Program dan Kegiatan,

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2023, Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
H	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
19	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan

20	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
21	Fasilitasi Penataan Wilayah
I	Pelaksanaan Otonomi Daerah
22	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
23	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
24	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
J	Fasilitasi Kerjasama Daerah
25	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
26	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
27	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Alokasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bersumber pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dengan total pagu sebesar Rp. 4.717.478.704,- (Empat milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.4.159.349.544,- dan belanja modal sebesar Rp. 551.210.400,- dengan realisasi Rp. 4.627.596.108,-

Untuk lebih jelas hasil realisasi anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Keuangan		
			Rp	%	
	BELANJA DAERAH	4.717.478.704	4.627.596.108	98,09	89.882.596
	BELANJA OPERASI	4.159.349.544	4.076.385.708	98,01	82.963.836
	BELANJA MODAL	558.129.160	551.210.400	98,76	6.918.760
A	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	1.760.405.946	1.703.689.849	96,78	1.703.689.849
I	<i>PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</i>	47.749.090	46.284.250	96,93	1.464.840
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	33.043.700	32.243.500	97,58	800.200
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>	14.705.390	14.040.750	95,48	664.640
II	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	82.223.200	77.183.000	93,87	5.040.200
3	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	69.535.000	65.625.000	94,38	3.910.000
4	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	12.688.200	11.558.000	91,09	1.130.200
III	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	52.212.650	39.864.790	76,35	12.347.860
5	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	11.180.100	10.822.500	96,80	357.600
6	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	23.300.000	16.275.690	69,85	7.024.310
7	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD</i>	17.732.550	12.766.600	72,00	4.965.950
IV	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	60.485.634	57.069.700	94,35	3.415.934
8	<i>Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	7.520.000	7.146.000	95,03	374.000
9	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>	52.965.634	49.923.700	94,26	3.041.934
V	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.134.968.941	1.117.836.400	98,49	17.132.541
10	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	397.480.400	393.039.900	98,88	4.440.500
11	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	54.598.900	53.065.600	97,19	1.533.300
12	<i>Penyediaan Barang Cetak dan</i>	39.368.000	37.922.000	96,33	1.446.000
13	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	12.300.000	11.900.000	96,75	400.000

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Keuangan		
			Rp	%	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	631.221.641	621.908.900	98,52	9.312.741
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.648.760	158.170.500	98,46	2.478.260
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.648.760	158.170.500	98,46	2.478.260
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.989.671	77.805.493	90,48	8.184.178
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.457.731	4.425.000	99,27	32.731
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	6.678.000	5.455.185	81,69	1.222.815
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.853.940	67.925.308	90,74	6.928.632
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	136.128.000	129.475.716	95,11	6.652.284
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	42.132.000	40.198.295	95,41	1.933.705
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	78.336.000	73.875.421	94,31	4.460.579
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000	15.402.000	98,35	258.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.957.072.758	2.923.906.259	98,88	33.166.499
IX	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1.052.613.022	1.047.550.631	99,52	5.062.391
22	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	4.904.000	4.900.600	99,93	3.400
23	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	384.634.247	381.655.190	99,23	2.979.057
24	Fasilitasi Penataan Wilayah	663.074.775	660.994.841	99,69	2.079.934
X	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.077.507.848	1.062.987.062	98,65	14.520.786
25	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Daerah	244.500.500	242.320.029	99,11	2.180.471
26	Pengembangan Otonomi dan Penataan Ur	254.386.598	253.525.397	99,66	861.201
27	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	578.620.750	567.141.636	98,02	11.479.114
XI	Fasilitasi Kerjasama Daerah	826.951.888	813.368.566	98,36	13.583.322
28	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	437.699.671	428.936.054	98,00	8.763.617
29	Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta	187.690.282	187.188.103	99,73	502.179
30	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	201.561.935	197.244.409	97,86	4.317.526

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Yang Realisasinya diatas 95% adalah :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD
 - d. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - j. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - m. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - n. Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
 - o. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
 - p. Fasilitasi Penataan Wilayah
 - q. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - r. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 - s. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - t. Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
 - u. Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
 - v. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
2. Sub Kegiatan Yang Realisasinya diatas 90 s.d 95% adalah :
- a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun OPD
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Sub Kegiatan Yang Realisasinya dibawah 90 % adalah :
- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dari uraian diatas, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak tercapai target pencapaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan secara umum dikarenakan adanya efisiensi dan tingginya standar harga yang ditetapkan.

Terkait dengan implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan dengan Rencana Strategis Biro Pemerintahan tahun 2021-2026 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas LPPD;
- 2) Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi;
- 3) Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah;
- 4) Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- 5) Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah;
- 6) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan
- 7) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Berikut Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

Tabel T-C 29																			
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023																			
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2021)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN						
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
4	01	01																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%		%		%		%								
4	01	01	1.01																
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat	100	%	85	%	85	%	85	%	100%		100%	100%				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	18	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	3	100%
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	6	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	100%
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	6	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	100%
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	12	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	100%	3	dokumen	3	100%
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	6	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	100%
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan Capaian Kinerja yang disusun	18	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	3	100%
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	18	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	3	dokumen	3	100%
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%	85	%	85	%	85	%	100%		%		
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapat Honor	60	orang	10	orang	10	orang	10	orang	100%	7	orang	7	100%
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP,SPM dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen			dokumen		
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun	6	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	100%
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen			dokumen		
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	108	dokumen	18	dokumen	18	dokumen	18	dokumen	100%	18	dokumen	18	100%

4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Barang Milik Daerah	100	%	85%	%	85%	%	85%	%	100%		%		
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan,	6	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	100%
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	18	unit	3	unit	3	unit	3	unit	100	3	unit	3	100%
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, pengawasan, pengendalian BMD pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen			dokumen		
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah	6	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	3	dokumen	3	100%
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Daerah	100	%	85	%	85	%	85	%	100	100%	%	100%	100%
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80	stel	0	stel	0	stel	0	stel			stel		
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola dan disusun	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen			dokumen		
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	6	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100%		kali		
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang melaksanakan Bimtek	40	orang	0	orang	15	orang	15	orang	100%	15	orang	15	100%
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	85	%	85	%	85	%	100%	100%	%	100%	100%
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	240	unit	70	unit	70	unit	70	unit	100%		unit		
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	72	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	15	bulan	15	100%
						2 Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilaksanakan	6000	kotak	2000	kotak	1000	kotak	1000	kotak	100%	1000	kotak	1000	100%
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1200	buah	200	buah	200	buah	200	buah	100%	200	buah	200	100%
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180	buah	30	buah	30	buah	30	buah	100%	30	buah	30	100%
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	300	dokumen	50	dokumen	50	dokumen	50	dokumen	100%	50	dokumen	50	100%
4	01	01	1.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia													
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan	100	%	85	%	85	%	85	%	100%		%	100	100%
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	unit	0	unit	0	unit	0	unit			unit		
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer, laptop, printer, televisi dan kulkas yang disediakan	30	unit	13	unit		unit	5	unit			unit		

4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	85	%	85	%	85	%	100%		%	100	100%
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan surat menyurat yang terpenuhi	12000	surat	2000	surat	2000	surat	2000	surat	100%	2000	surat	2000	100%
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jumlah kapasitas tagihan jaringan internet yang dibayarkan	12	mbps	2	mbps	2	mbps	2	mbps	100%	2	mbps	2	100%
						2 Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	12	rekening	2	rekening	2	rekening	2	rekening	100%	2	rekening	2	100%
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2	orang	2	orang	2	orang	2	orang	100%	2	orang	2	100%
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100	%	85	%	85	%	85	%	100%		%		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dipelihara	6	unit	2	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	1	100%
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	12	unit	2	unit	2	unit	2	unit	100%	2	unit	2	100%
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80	unit	54	unit	54	unit	54	unit	100%		unit		
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Dokumen LPPD													
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.	100	%	85	%	85	%	85	%	100%		%		
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terlaksananya pengelolaan administrasi kebijakan pemerintah	6	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum	6	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	- Terinventarisasinya unsur-unsur rupabumi buatan	6	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	100%
						- Terlaksananya fasilitasi Penataan Nagari/Desa	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	100%	19	Kab/kota	19	100%
						- Terlaksananya pemberian penghargaan kepada Camat terbaik	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	100%	19	Kab/kota	19	100%
						- Terlaksananya pembinaan batas nagari/desa	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	100%	19	Kab/kota	19	100%
						- Terlaksananya Rakor Camat se Sumatera Barat	600	orang	0	orang	0	orang	0	orang	100%		orang		
						- Terlaksananya rakor walinagari/kepala desa se Sumatera Barat	300	orang	0	orang	0	orang	0	orang	100%		orang		
						- Usulan penegasan batas Kab/kota di Prov. Sumbar	2	segmen	2	segmen	2	segmen	2	segmen	100%	2	segmen	2	100%

4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	%		%		%		%		%			
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	- Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi DPRD/Legislatif	240	dokumen	40	dokumen	40	dokumen	40	dokumen	100%	20	dokumen	20	100%
						- Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi KDH	240	dokumen	40	dokumen	40	dokumen	40	dokumen	100%	20	dokumen	20	100%
						- Jumlah fasilitasi pelayanan koordinasi MPR RI, DPR RI, dan DPD RI	100	%	0	%	0	%	0	%			%		
						- Jumlah kali Rakor	24	kali	6	kali	6	kali	6	kali	100%	4	kali	4	100%
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	- Terlaksananya pembinaan dan koordinasi penerapan SPM	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	100%	19	Kab/kota	19	100%
						- Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	100%	19	Kab/kota	19	100%
						- Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
						- Terlaksananya Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2021	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
						- Tersusunya Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi Sumatera Barat	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	- Bimtek Penyusunan LPPD prov dan Kab/Kota	400	orang	0	orang	0	orang	0	orang	100%		orang		100%
						- Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	100%	19	Kab/kota	19	100%
						- Penyusunan LKPJ	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
						- Penyusunan LPPD Prov.	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
						- Terlaksananya Pembinaan LPPD Kab/Kota Se Sumbar	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	19	Kab/kota	100%	19	Kab/kota	19	100%
						- Terselenggaranya fasilitasi Peningkatan Kapasda	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama daerah sesuai peraturan perundangan yang	100	%	85	%	85	%	85	%	100%		%		
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	- Rencana induk kerjasama daerah	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	100%
						- Terfasilitasinya kerjasama pemerintah	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
						- Terlaksananya kerjasama wajib	6	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	100%
						- Terlaksananya rapat koordinasi kerjasama daerah	6	kali	2	kali	1	kali	1	kali	100%	1	kali	1	100%
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	- Didapatkannya Potensi Jaringan Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Pihak Ketiga Dalam dan Luar Negeri	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
						- Terlaksananya Fasilitasi dan Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Pihak Ketiga dalam dan Luar Negeri	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
						- Terlaksananya Rakor Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga	6	rumusan	2	rumusan	1	rumusan	1	rumusan	100%	1	rumusan	1	100%
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	- Laporan terkait evaluasi kerjasama	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	100%
						- Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Pemerintah, Badan Usaha/swasta dan Pihak Ketiga Dalam dan Luar Negeri	6	laporan	2	laporan	1	laporan	2	laporan	100%	1	laporan	1	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk pencapaian 2 Program yang dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sudah mencapai hasil sesuai target, namun masih terdapat beberapa target indikator sub kegiatan yang tidak tercapai yaitu :

1. Pelaksanaan Rakor Camat Se Sumatera Barat.
Tidak dilaksanakan disebabkan rasionalisasi anggaran
2. Pelaksanaan Raker Wali Nagri se Sumatera Barat
Tidak dilaksanakan karena tidak menjadi tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah lagi dan sudah berpindah menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
3. Bimtek penyusunan LPPD
Tidak dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Pemerintahan, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Biro Pemerintahan berganti nama menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 pasal 5 adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk menentukan tolak ukur keberhasilan pelayanan Perangkat Daerah perlu dirumuskan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah merumuskan Indikator Kinerja Utama termasuk indikator program untuk menilai keberhasilan kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
1.	Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	85%	100%	117,64%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%	99,93%	99,33%	Sangat Baik
3.	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik
4.	Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan	85%	100%	117,64%	Sangat Baik
5.	Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	Persentase usulan Nagari/desa/kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahanya	100%	100%	100%	Sangat Baik
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79)	BB (74,35)	94,11%	Sangat Baik
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (96,77)	107,52%	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja					104,16%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja dari 7 (tujuh) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 104,16 %.

Selanjutnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C-30 sebagaimana terlampir.

**Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	-	-	85%	90%	95%	100%	100%	100%	95%	100%	
2	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	-	-	100%	100%	100%	100%	99,93%	100%	100%	100%	
3	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan	-	-	85%	90%	95%	100%	100%	100%	95%	100%	
5	Persentase Kab/Kota yang tertib administrasi kewilayahnya	-	-	85%	90%	95%	100%			95%	100%	
6	Persentase usulan Nagari/desa/ kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahnya			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	-	-	BB (79)	A (83)	A (87)	A (90)	BB (74,35)	A (83)	A (87)	A (90)	
8	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	-	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (96,77)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (100)	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Merujuk pada Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2026, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berada pada posisi mendukung misi ketujuh pembangunan Sumatera Barat, yaitu "MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS". Misi ini dimaknai sebagai misi yang diemban untuk mendorong pemerintah daerah kearah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selain itu, misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sector swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai misi MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS selama lima tahun terakhir.

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Secara Administrasi Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan 4 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu dan telah ditegaskan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya untuk batas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat terdapat 32 segmen batas, dari 32 segmen Batas Kabupaten/Kota 20 segmen batas telah ditegaskan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, 4 segmen batas proses penebitan Peraturan Menteri Dalam

Negeri dan 22 segmen batas proses fasilitasi percepatan penegasan batas daerah Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa permasalahan yang terjadi di dalam proses percepatan penegasan abatas daerah antar Kabupaten/Kota diantaranya belum ada persamaan persepsi oleh pejabat/aparat pemerintah dan masyarakat tentang daerah batas administrasi pemerintahan dan batas ulayat, Penegasan batas yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang berbatasan, seringkali berulang-ulang atau direvisi secara sepihak. Sehingga kesepakatan yang telah diambil belum sepenuhnya ditaati oleh pengambil kebijakan di Kabupaten/Kota, dokumen dan data batas beberapa daerah masih diragukan, karena dokumen batas daerah tidak jelas dan ketika pembentukan daerah Kabupaten/Kota, Peta batas daerah yang belum ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri masih bersifat batas kira-kira. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang masih rendah, terutama terkait tekhnis Pemetaan Wilayah dan minimnya anggaran kegiatan.

Dalam proses pelaksanaan percepatan penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan beberapa upaya seperti melaksanakan fasilitasi kedua daerah berbatasan, pengumpulan data dan dokumen pendukung, sosialisasi terhadap urgensi penegasan batas daerah serta melakukan verifikasi lapangan ke daerah yang belum memiliki kesepakatan.

2. Belum maksimalnya pelaksanaan kerjasama wajib antar pemerintah daerah perbatasan.

Dalam pelaksanaan kerja sama wajib antar Pemerintah Daerah, baik antar kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi tetangga terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan kerja sama tersebut. Pertama, Peraturan Dasar Kerja Sama Daerah baru diterbitkan, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan masih dalam tahap sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kedua, Kementerian Dalam Negeri baru

mengamanatkan pedoman pemetaan potensi kerja sama daerah melalui surat edaran Nomor: 119/3140/BAK tanggal 26 Oktober 2020 perihal Pedoman Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah sehingga masih belum optimalnya pemahaman aparat pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam mengelaborasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara daerah provinsi dengan Kabupaten/kota.

Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, pandangan tentang koordinasi pemerintahan bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyesuaian unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan.

Koordinasi pemerintahan tentunya menghadapi tantangan yang besar, yang disebabkan oleh masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Koordinasi pemerintahan menjadi faktor dominan ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Ego sektoral yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintah, yang terkesan gengsi untuk bekerjasama, meminta bantuan atau sekedar bertanya dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Pemegang peran koordinasi dalam pemerintahan selalu menjadi poros, dan penjaga keseimbangan serta kelancaran berputarnya mesin pemerintahan yang ada disepertinya.

4. Pemenuhan SPM belum menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Sumatera Barat memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sehingga diharapkan target Standar Pelayanan Minimal

yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan pada masing-masing Kementerian.

Dalam penyelenggaraan penerapan SPM, masih banyak daerah yang belum menindaklanjuti kebijakan SPM dalam penyelenggaraan pemerintahannya baik dalam kegiatan perencanaan, implementasi maupun evaluasi kebijakan Daerah. Salah satu faktor penyebabnya adalah:

- a. Masih banyaknya aparat pemerintah daerah khususnya aparat kabupaten/kota yang belum memahami kebijakan SPM secara benar baik level pengambil kebijakan maupun level Kepala OPD teknis sehingga timbul anggapan bahwa kebijakan SPM bukan merupakan kebijakan yang menjadi prioritas.
- b. Dengan pemahaman yang tidak benar tersebut maka kebijakan SPM tidak dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah, hal ini berimbas pada tidak sepenuhnya program dan kegiatan pencapaian SPM dapat termuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, bahkan tidak mendapat alokasi anggaran yang memadai;
- c. Kebijakan SPM sebagai indikator kesejahteraan tidak dijadikan sebagai unsur penilaian kinerja pemerintahan Daerah sehingga SPM tidak dijadikan salah satu indikator keberhasilan Kepala Daerah. Dengan kondisi yang demikian maka SPM cenderung diabaikan baik oleh pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada Pengambil Kebijakan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik dalam bentuk Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Bimtek. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat diketahui sejauhmana keseriusan pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

5. Belum optimalnya data dukung dalam perencanaan perhitungan untuk pemenuhan SPM.

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengumpulan data
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
- d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Ketepatan sasaran penerima SPM tergantung dengan data yang dikumpulkan. Ketersediaan data yang belum optimal berpengaruh terhadap perhitungan kebutuhan penerima SPM dan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.

Kesulitan dalam mendapatkan data ini disebabkan masih kurangnya pemahaman aparatur perangkat daerah terhadap sasaran penerima Standar Pelayanan Minimal. Untuk itu, perlu terus diberikan pemahaman teknis kepada aparatur pelaksana terkait tata cara pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan penerima SPM baik secara teori maupun praktek di lapangan.

Adapun upaya yang akan terus dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan bimtek dengan OPD/instansi di Provinsi dan kabupaten/kota. Melalui penyelenggaraan bimtek tersebut diharapkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai tata cara pemenuhan SPM di daerah dimulai dari pendataan, perhitungan pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memperhatikan rumusan program dan besaran pagu indikatif pada rancangan awal RKPD Tahun 2025, dan membandingkannya dengan hasil analisis kebutuhan anggaran pada Tahun 2023, dapat dilihat bahwa 2 (dua) program yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan.

Dari kegiatan yang ada setelah dilaksanakan telah dilakukan review dari rancangan awal kegiatan dan permasalahan yang timbul menjadi bahan untuk penganalisaan kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dalam perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

TABEL T.C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Padang	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.932.205.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Padang	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.927.205.000	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	134.205.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	134.205.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	80.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	80.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	34.205.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	34.205.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	20.000.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		120.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		120.000.000	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	90.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	90.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Padang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Padang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	30.000.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah padda Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	58.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah padda Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	58.000.000	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	23.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	23.000.000	
7	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada perangkat daerah	Padang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	1 laporan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	1 laporan	15.000.000	
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	20.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	20.000.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	130.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	130.000.000	
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 paket	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 paket	30.000.000	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Padang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 orang	100.000.000	

*Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Tahun 2025*

V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.105.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.100.000.000	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	150.000.000	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	50.000.000	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	60.000.000	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	60.000.000	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Padang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12 dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Padang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12 dokumen	10.000.000	
16	Fasilitasi kunjungan Tamu	Padang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	20.000.000	Fasilitasi kunjungan Tamu	Padang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	20.000.000	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 laporan	750.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 laporan	750.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000		Padang		1 dokumen		
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang			80.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang			80.000.000	
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	80.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	80.000.000	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		115.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		115.000.000	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	15.000.000	
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	90.000.000	

*Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Tahun 2025*

VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		190.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		190.000.000
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	50.000.000
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	70.000.000
25	Pemeliharaan Mebel	Padang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	30.000.000	Pemeliharaan Mebel	Padang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	30.000.000
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	40.000.000
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Padang	1 Dokumen LPPD	1 dokumen	3.598.335.000		Padang	1 Dokumen LPPD	1 dokumen	3.593.335.000
			2 Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga	100 %				2 Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga	100 %	
			3 Persentase fasilitasi usulan penataan Nagari/desa	100 %				3 Persentase fasilitasi usulan penataan Nagari/desa	100 %	
			4 Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	100 %				4 Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	100 %	
			5 Rekomendasi kebijakan tentang implementasi SPM kepada pengambilan kebijakan					5 Rekomendasi kebijakan tentang implementasi SPM kepada pengambilan kebijakan		

*Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Tahun 2025*

IX	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Padang	Presentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100 %	1.148.335.000	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Padang	Presentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100 %	1.143.335.000	
27	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Padang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 dokumen	500.000.000	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Padang	Terlaksananya pengelolaan administrasi kebijakan pemerintah	1 dokumen	500.000.000	
28	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Padang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 kegiatan	300.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Padang	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum	1 kegiatan	300.000.000	
29	Fasilitasi Penataan Wilayah	Padang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	348.335.000	Fasilitasi Penataan Wilayah	Padang		3 Dokumen	343.335.000	
X	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Padang	Presentase Pelaksanaan Otonomi Daerah		1.200.000.000	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Padang	Presentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		1.200.000.000	
30	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Padang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	6 Dokumen	350.000.000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Padang		6 Dokumen	350.000.000	
31	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Padang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	19 Kab/Kota	350.000.000	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Padang		19 Kab/Kota	350.000.000	
32	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Padang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 laporan	500.000.000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Padang		1 laporan	500.000.000	
XI	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Padang	Presentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah		1.250.000.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Padang	Presentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		1.250.000.000	
33	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Padang	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	600.000.000	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Padang		1 Dokumen	600.000.000	
34	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Padang	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Padang		1 Dokumen	250.000.000	
35	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Padang	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 laporan	400.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Padang		1 laporan	400.000.000	

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C 32
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Setelah mencermati kebijakan nasional yang berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki program yang berkaitan dengan kebijakan nasional, karena fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang merupakan fungsi penunjang/*supportingunit* pada sekretariat daerah dan bukan Perangkat Daerah teknis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan arah atau kondisi akhir yang diharapkan yang akan diwujudkan atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berikut tujuan, sasraan dan Indikator Kinerja Utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 – 2026 :

Tujuan :

1. Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertib di Daerah;
dan
3. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
2. Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi;
3. Optimalisasi pelaksanaan kerjasama yang telah ditetapkan

4. Optimalnya Fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
5. Meningkatnya kepastian hukum wilayah pemerintah daerah
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
7. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Indikator Kinerja Utama :

1. Persentase dokumen pendukung indicator kinerja kunci yang valid dan akuntabel
2. Persentase Capaian Pemenuhan SPM Provinsi
3. Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama
4. Persentase tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilaksanakan
5. Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya
6. Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya
7. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
8. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

8.3 Program dan Kegiatan

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah serta rumusan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada Renstra Biro Pemerintahan 2016-2021, dan mencermati hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, maka dirumuskan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan tersebut, digulirkan untuk menunjang fungsi utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dana yang dibutuhkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 5.312.056.000,- (Lima milyar tiga ratus dua belas juta lima puluh enam ribu rupiah).

Program dan kegiatan beserta rencana target kinerja dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 beserta Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut T-C 33 :

T.C 33								
Rencana Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026								
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	Padang	100 %	1.932.205.000	PAD	100 %	2.285.000.000
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja	Padang	100 %	141.089.000	PAD	100 %	155.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	6 dokumen	86.884.000	PAD	6 dokumen	85.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	3 laporan	34.205.000	PAD	3 laporan	40.000.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	3 laporan	20.000.000	PAD	3 laporan	30.000.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Tertib Administrasi Keuangan			120.269.000	PAD		45.000.000
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang	1 dokumen	90.000.000	PAD	1 dokumen	10.000.000

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Padang	3 laporan	30.269.000	PAD	3 laporan	35.000.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Padang	100 %	60.103.800	PAD	100 %	75.000.000
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	3 dokumen	23.000.000	PAD	3 dokumen	25.000.000
7	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	1 laporan	17.103.800	PAD	1 laporan	20.000.000
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	2 laporan	20.000.000	PAD	2 laporan	30.000.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang	100 %	131.500.000	PAD	100 %	185.000.000
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Padang	40 paket	31.500.000	PAD	40 paket	60.000.000
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Padang	36 orang	100.000.000	PAD	36 orang	125.000.000
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang	100 %	1.006.963.200	PAD	100 %	1.345.000.000
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Padang	1 paket	50.000.000	PAD	1 paket	200.000.000

12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Padang	1 paket	50.000.000	PAD	1 paket	100.000.000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Padang	2 paket	60.000.000	PAD	2 paket	80.000.000
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Padang	1 paket	60.003.200	PAD	1 paket	70.000.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Padang	12 dokumen	10.000.000	PAD	12 dokumen	20.000.000
16	Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Padang	10 laporan	21.960.000	PAD	10 laporan	25.000.000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang	160 laporan	750.000.000	PAD	160 laporan	850.000.000
18	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Padang	1 dokumen	5.000.000	PAD	1 dokumen	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Padang		159.400.000	PAD		100.000.000
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Padang	4 unit	159.400.000	PAD	4 unit	100.000.000
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Padang		115.000.000	PAD		155.000.000
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	1 laporan	10.000.000	PAD	1 laporan	10.000.000
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Padang	1 laporan	15.000.000	PAD	1 laporan	25.000.000

22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang	1 laporan	90.000.000	PAD	1 laporan	120.000.000
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.880.000	PAD		225.000.000
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Padang	1 unit	50.000.000	PAD	1 unit	60.000.000
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Padang	2 unit	70.000.000	PAD	2 unit	80.000.000
25	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Padang	10 unit	30.000.000	PAD	10 unit	40.000.000
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Padang	50 unit	47.880.000	PAD	50 unit	45.000.000
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1 Dokumen LPPD	Padang	1 dokumen	3.598.335.000	PAD	1 dokumen	4.350.000.000
		2 Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga	Padang	100 %		PAD	100 %	
		3 Persentase fasilitasi usulan penataan	Padang	100 %		PAD	100 %	
		4 Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	Padang	100 %		PAD	100 %	
		5 Rekomendasi kebijakan tentang implementasi SPM kepada pengambilan	Padang			PAD		

IX	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Padang	100 %	1.148.335.000	PAD	100	1.250.000.000
27	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintah	Padang	dokumen	500.000.000	PAD	1 dokumen	500.000.000
28	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Padang	kegiatan	300.000.000	PAD	1 kegiatan	350.000.000
29	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Padang	Dokumen	348.335.000	PAD	3 Dokumen	400.000.000
X	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah			1.200.000.000	PAD		1.400.000.000
30	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Padang	Dokumen	350.000.000	PAD	6 Dokumen	400.000.000
31	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Padang	dokumen	350.000.000	PAD	19 Kab/Kota	500.000.000
32	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Padang	laporan	500.000.000	PAD	1 laporan	500.000.000
XI	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	Padang		1.250.000.000	PAD		1.700.000.000
33	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah Yang Difasilitasi	Padang	Dokumen	600.000.000	PAD	1 Dokumen	1.000.000.000
34	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerjasama badan Usaha / Swasta Yang Difasilitasi	Padang	Dokumen	250.000.000	PAD	1 Dokumen	300.000.000
35	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerjasama Yang Dievaluasi	Padang	laporan	400.000.000	PAD	1 laporan	400.000.000
	TOTAL PAGU INDIKATIF				5.530.540.000			6.635.000.000

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2025. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2025 disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Biro.
2. Pencapaian Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Misi ketujuh ini memiliki tujuan berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Selanjutnya dirinci 3 sasaran yaitu :
(i) meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik

Berdasarkan faktor-faktor diatas perumusan/perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
7	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada Perangkat Daerah
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16	Fasilitasi kunjungan Tamu
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Perangkat Daerah
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
25	Pemeliharaan Mebel
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
IX	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
27	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
28	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
29	Fasilitasi Penataan Wilayah
X	Pelaksanaan Otonomi Daerah
30	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
31	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
32	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
XI	Fasilitasi Kerjasama Daerah
33	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
34	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
35	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

BAB IV PENUTUP

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan program lanjutan pelaksanaan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan arahan / strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang telah dicapai selama lima tahun sebelumnya serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan selama lima tahun kedepan.

Dalam rencana kerja ini juga ditetapkan pendanaan indikatif, lokasi dan target kegiatan dengan tujuan agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dalam target dan waktu secara efektif dan optimal.

Rencana Kerja ini menjadi dasar penganggaran dan pengalokasian kegiatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan selanjutnya sebagai bahan monitoring evaluasi kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum maksimal pendanaannya yang disebabkan oleh pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sementara kebutuhan masing-masing program/kegiatan lebih besar untuk mencapai sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk indikator kinerja. Ke depan Biro Pemerintahan berharap mendapat dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

**Kepala Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah**



**Donni Rahmat Samulo, S.STP, M.Si
NIP. 19760618 199511 1001**